

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM
UNTUK EKONOMI KERAKYATAN DI PROVINSI RIAU**

UNIVERSITAS ANDALAS
DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Doktor Hukum



Oleh

RAHDIANSYAH
NIM: 1930112003

Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H; Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum;
Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd.

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN DI PROVINSI RIAU

Rahdiansyah, 1930112003, 337 halaman, Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2026

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan kelembagaan dan normatif dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di daerah, di mana pelaksanaan TJSL cenderung hanya berfokus pada kegiatan dan program yang bersifat reaktif serta dominan filantropi, sehingga belum terarah secara terukur untuk memperkuat ekonomi lokal. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan formulasi instrumen hukum TJSL yang lebih operasional dan responsif untuk mengarahkan program berbasis indikator ekonomi kerakyatan, memperkuat kemitraan adil dengan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)/koperasi, memastikan partisipasi bermakna, serta menekankan akuntabilitas hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana konsep TJSL perusahaan di Indonesia; (2) bagaimana penerapan TJSL oleh perusahaan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau; dan (3) seperti apa instrumen hukum TJSL yang ideal untuk mendukung ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif-empiris, dengan memadukan analisis bahan hukum sekunder dan data primer lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi non-partisipan, serta studi dokumentasi. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggabungkan analisis normatif/doktrinal dan temuan empiris dari informan pemerintah daerah, perwakilan perusahaan, dan pelaku UMKM/masyarakat; responden penelitian mencakup korporasi (PT. Adei Plantation & Industry dan PT. Murni Sam Sam), pemerintah daerah, serta pelaku ekonomi kerakyatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL di daerah masih didominasi oleh program filantropi yang belum menguatkan ekonomi kerakyatan secara sistematis. Implementasi TJSL yang ideal membutuhkan instrumen hukum yang mampu mengarahkan program TJSL pada penguatan kemitraan, peningkatan partisipasi, dan akuntabilitas hasil berbasis indikator ekonomi lokal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya perumusan model instrumen hukum TJSL yang lebih responsif dan berkeadilan untuk mempertemukan mandat normatif TJSL dengan kebutuhan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam kerangka otonomi daerah. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam optimalisasi TJSL perusahaan sebagai instrumen hukum pembangunan ekonomi kerakyatan di Provinsi Riau.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, instrumen hukum, ekonomi kerakyatan, kemitraan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Provinsi Riau

ABSTRACT
**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS LEGAL
INSTRUMENTS IN PEOPLE'S ECONOMIC DEVELOPMENT
IN RIAU PROVINCE**

*Rahdiansyah, 1930112003, 337 pages, Doctoral Program in Law
Faculty of Law, Universitas Andalas, 2026*

This research is motivated by institutional and normative issues in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in the regions, where the implementation of TJSL tends to focus only on activities and programs that are reactive and dominant in philanthropy, so that they have not been measurably directed to strengthen the local economy. This raises the urgent need for a more operational and responsive formulation of CSR legal instruments to direct programs based on people's economic indicators, strengthen fair partnerships with Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)/cooperatives, ensure meaningful participation, and emphasize accountability for results. The purpose of this research is to answer three main questions: (1) how is the concept of corporate CSR in Indonesia; (2) how the implementation of TJSL by companies in the development of the people's economy in Riau Province; and (3) what is the ideal CSR legal instrument to support the people's economy in Riau Province. The research method used is a normative-empirical legal method, by combining the analysis of secondary legal materials and primary field data obtained through interviews, non-participant observations, and documentation studies. The analysis was carried out in a qualitative-descriptive manner by combining normative/doctrinal analysis and empirical findings from local government informants, company representatives, and MSME/community actors; The respondents of the study include corporations (PT. Adei Plantation & Industry and PT. Murni Sam Sam), local governments, and people's economic actors. The results of the study show that the implementation of CSR in the regions is still dominated by philanthropic programs that have not systematically strengthened the people's economy. The ideal implementation of CSR requires a legal instrument that is able to direct the CSR program on strengthening partnerships, increasing participation, and accountability for results based on local economic indicators. The conclusion of this study is the need to formulate a more responsive and equitable model of CSR legal instruments to bring together the normative mandate of CSR with the need for people's economic empowerment within the framework of regional autonomy. This model is expected to be a reference in optimizing the company's TJSL as a legal instrument for the development of the people's economy in Riau Province.

Keywords: *Corporate Social Responsibility, legal instrument, people's economy, partnership, Micro, Small and Medium Enterprises, Riau Province.*